

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

BAB I

INDIKATOR EKONOMI

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
1. Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp Tril)	1,506.1	1,579.6	1,660.6	1,749.6	447.4 (1)
2. Pertumbuhan PDB (%)	4.38	4.88	5.13	5.60	4.59 (1)
3. Inflasi (%)	10.03	5.06	6.40	17.11	2.03 (2)
4. Neraca Transaksi Berjalan (US\$ Billion)	4.7	4.0	2.9	0.93	-
5. Total Ekspor (US\$ Billion)	57.0	55.6	69.7	85.57	29.96 (3)
6. Ekspor Nonmigas (US\$ Billion)	44.9	43.1	54.10	66.32	23.13 (3)
7. Total Impor (US\$ Billion)	31.2	29.5	46.20	57.55	18.01 (3)
8. Impor Nonmigas (US\$ Billion)	24.8	22.6	34.60	40.16	12.94 (3)
9. Neraca Perdagangan (US\$ Billion)	25.8	26.1	23.50	28.02	11.95 (3)
10. Uang Primer (Rp Triliun)	138.3	136.5	199.7	239.8	230.6 (4)
11. Uang Beredar (Rp Triliun)					
a. Arti Sempit (M1)	191.9	207.6	253.80	281.9	277.3 (5)
b. Arti Luas (M2)	883.9	911.2	1,033.5	1,203.2	1,195.1 (5)
12. Dana Pihak Ketiga Perbankan (Rp Triliun)	845.0	866.3	965.1	1,134.1	1,129.4 (5)
13. Kredit Perbankan (Rp Triliun)	365.4	411.7	553.6	689.7	682.1 (5)
14. Suku Bunga (persen per tahun)					
a. SBI 1 Bulan	12.9	8.1	7.40	12.75	12.50 (6)
b. Deposito 1 Bulan	12.8	7.7	6.40	11.98	11.77 (5)
c. Kredit Modal Kerja	18.3	15.8	13.40	15.92	16.35 (5)
d. Kredit Investasi	17.8	16.3	14.10	15.43	15.97 (5)
15. Rupiah/US\$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)	8,940	8,330	9,355	9,830	9,220 (7)
16. Persetujuan Investasi					
- Domestik (Rp Triliun)	25.3	16.0	36.80	50.58	0.82 (8)
- Asing (US\$ Billion)	9.7	6.2	10.30	13.58	1.3 (8)
17. IHSG BEJ	424.9	742.5	1,000.2	1,162.6	1,330.0 (7)
18. Nilai Kapitalisasi Pasar BEJ (Rp Triliun)	268.4	411.7	679.9	758.4	756.3 (4)

1. Suku Bunga

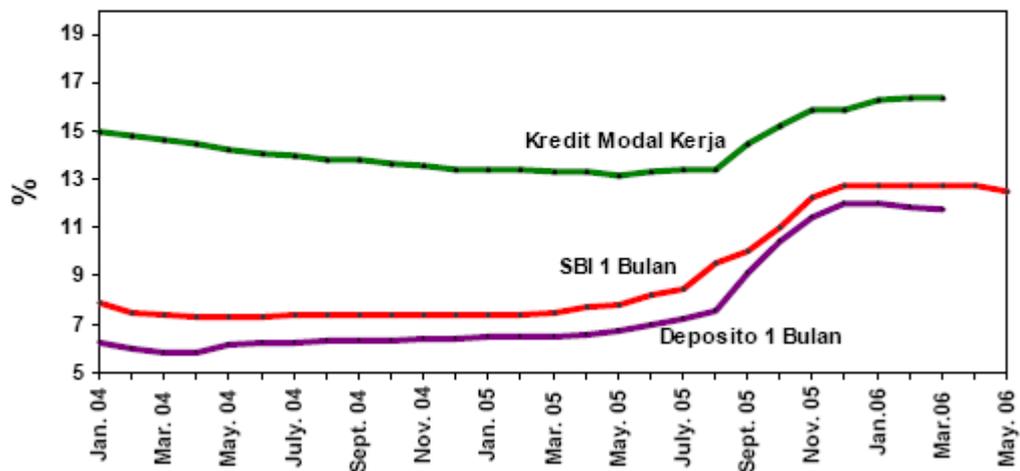
Dewan Gubernur menilai bahwa kestabilan ekonomi makro hingga Juni 2006 semakin membaik yang ditunjukkan oleh kecenderungan inflasi yang terus menurun dan tekanan eksternal yang cenderung mereda. Inflasi pada bulan Juni tercatat sebesar 0,45%, sedangkan inflasi Juni 2006 terhadap Juni 2005 adalah sebesar 15,53%.

Setelah sekitar satu tahun berada dalam tren kenaikan suku bunga, akhirnya Bank Indonesia (BI) pada awal Mei 2006 lalu mulai menurunkan tingkat suku bunga. Pembalikan tren ini ditandai dengan turunnya *BI rate* sebesar 25 basis

poin dari 12,75 persen menjadi 12,5 persen. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga mengalami penurunan suku bunga.

Penurunan *BI rate* dan suku bunga SBI memang belum mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun hal ini merupakan angin segar bagi sektor riil karena pertanda bahwa BI tidak lagi mempertahankan kebijakan uang ketat (*tight biased*). Ini berarti bahwa suku bunga kredit akan menurun.

Grafik 3
Suku Bunga SBI, Deposito dan Kredit Modal Kerja
Januari 2003 - Mei 2006 (%)



2. Kurs Rupiah

Kurs rupiah dalam periode Juli 2006 menguat 75 poin dari Rp9.170/US\$ menjadi Rp9.095/US\$. Walaupun pada awal pekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung menguat tetapi pada penutupan akhir pekan justru rupiah semakin melemah, salah satu faktor yang disinyalir sebagai penyebabnya adalah krisis Timur Tengah yang kian memanas sehingga pelaku valas lebih memilih memegang dolar.

3. Indeks Harga Saham Gabungan

Dalam periode Juli 2006, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta mengalami kenaikan dan ditutup pada level 1.337,410 atau mengalami kenaikan 22,833 poin (1,74%), jika dibandingkan dengan penutupan indeks pekan sebelumnya. Para pengamat ekonomi mengatakan bahwa sentimen positif

kenaikan bursa global dan regional sebagai antisipasi kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunga pada 8 Agustus nanti memberi respons positif kuat di bursa. Selain itu, turunnya dolar dan menguatnya rupiah serta antisipasi kemungkinan Bank Indonesia menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin dari 12,25 persen menjadi 12,00 persen akan memicu gairah transaksi beli di BEJ.

4. Harga Minyak

Harga rata-rata minyak OPEC pekan lalu berfluktuasi tipis pada kisaran US\$68/barel. Awal pekan lalu harga minyak OPEC diperdagangkan pada level US\$67,99/barel, naik tipis ke level US\$68,71/barel, koreksi ke level US\$68,25/barel, kembali naik ke level US\$69,07/barel dan ditutup pada level US\$68,97/barel pada akhir pekan. Harga minyak dunia ini masih labil dan cenderung kembali naik yang dipicu oleh krisis Timur-Tengah, karena peristiwa keamanan dimana terjadi pertikaian antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Kondisi ini membuat pelaku pasar cemas terhadap kemungkinan adanya krisis yang meluas.

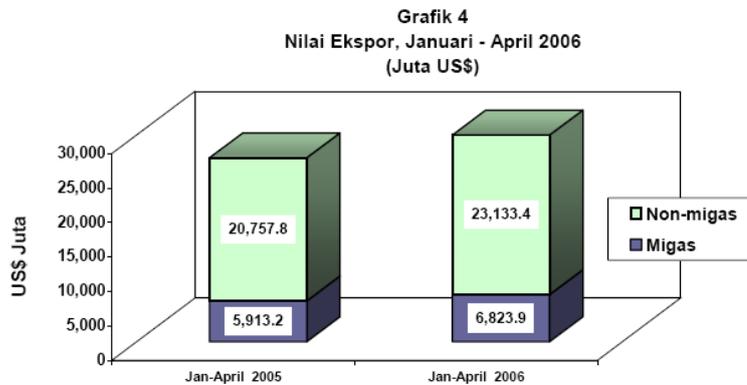
5. Cadangan Devisa Dan Uang Primer

Cadangan devisa sampai dengan akhir bulan Juni berada pada level US\$40,107.1 juta atau turun US\$ 4,062.1 juta dari posisi bulan Mei 2006 sebesar US\$44,169.2 juta. Berdasarkan Indikator Moneter BI, posisi uang primer pada akhir Juni yaitu sebesar Rp247,743 triliun, yang berarti mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar Rp11,360 triliun. Dengan cadangan devisa sebesar itu maka Indonesia memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh utang IMF pada tahun ini.

6. Perkembangan Ekspor

Dengan dicapainya nilai ekspor sebesar US\$ 7,6 milyar pada bulan April 2006, maka selama periode Januari-April 2006 nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 29,96 milyar atau naik 12,3 persen dari nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2005, yang sebesar US\$ 26,67 milyar. Dalam periode ini kenaikan ekspor migas lebih tinggi dari kenaikan ekspor non migas yaitu masing-masing 15,4 persen dan 11,4 persen. Ekspor migas meningkat dari US\$ 5,9 milyar menjadi US\$ 6,8 milyar, hal ini terkait dengan tingginya harga minyak di pasar

internasional sampai dengan bulan April 2006 yang sampai mencapai sekitar US\$ 70 per barel dibanding dengan harga minyak pada periode yang sama tahun 2005 sebesar rata-rata US\$ 46,71 per barel.



Note : Ekspor total naik sekitar 12,32%.

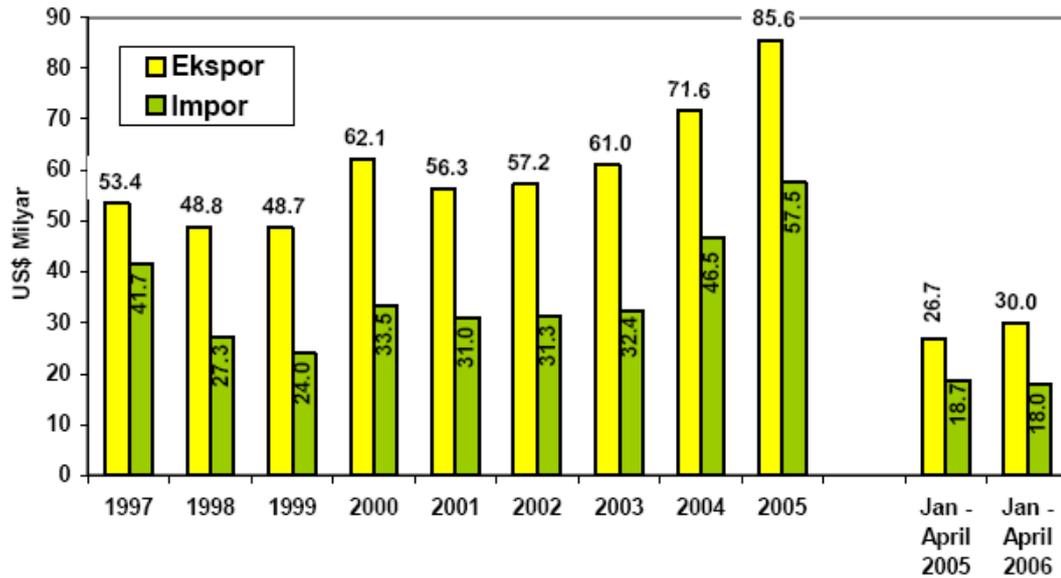
Sementara itu ekspor non migas meningkat dari sekitar US\$ 20,8 milyar menjadi US\$ 23,1 milyar. Peningkatan ekspor non migas terbesar di bulan April 2006 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$ 263,6 juta, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada mesin/peralatan listrik sebesar US\$ 110,4 juta. Dalam periode Januari-April 2006 hasil pertanian meningkat 24,08 persen dibanding periode yang sama tahun 2005. Sementara itu pada periode yang sama ekspor hasil industri naik sekitar 8,9 persen, dan ekspor hasil pertambangan naik sebesar 29,2 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekspor sektor industri ini menunjukkan belum Bergeraknya sektor riil. Secara internal hal ini disebabkan karena masih lemahnya daya beli masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Selain itu suku bunga kredit perbankan yang tinggi telah menjadi kendala bagi peningkatan investasi di sektor riil.

7. Perkembangan Impor

Berbeda dengan ekspor yang meningkat, maka realisasi nilai impor selama empat bulan pertama tahun 2006 turun sebesar 3,7 persen dari nilai impor pada periode yang sama tahun 2005, yaitu dari US\$ 18,69 milyar menjadi US\$ 18,01 milyar. Baik impor migas maupun non migas mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,9 persen dan 3,2 persen. Tingginya harga minyak di pasar dunia membawa dampak terhadap turunnya impor migas dari US\$ 5,34 milyar menjadi US\$ 5,07 milyar pada periode Januari – April 2006.

Grafik 4
Perkembangan Nilai Ekspor dan Nilai Impor Indonesia
(US\$ Milyar)



Sementara dalam periode yang sama impor non migas mengalami penurunan dari US\$ 13,36 milyar menjadi US\$ 12,94 milyar. Dilihat dari impor menurut golongan penggunaan barang, maka penurunan impor itu terjadi karena impor bahan baku dan penolong mengalami penurunan sebesar 8,4 persen. Kondisi ini dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap turunnya ekspor non migas pada dua-tiga bulan mendatang, karena umumnya komoditi sektor industri mempunyai *import content* yang tinggi. Sementara itu impor barang konsumsi dan impor barang modal masing-masing meningkat sebesar 17,8 persen dan 11,9 persen pada periode Januari – April 2006.

Berdasarkan indikator-indikator ekonomi yang ada, dapat dilakukan analisis bebearapa kondisi perekonomian Indonesia, salah satunya analisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

INFLASI

2.1 Pengertian Dan Sebab-Sebab Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa. Di Indonesia informasi mengenai inflasi dikelola oleh suatu badan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Setiap negara pasti mengalami inflasi, inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Beberapa penyebab inflasi diantaranya:

- a. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor. Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar di dalam negeri akibat penerimaan devisa.
- b. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. Karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, maka untuk menutupi keadaan tersebut akan dilakukan dengan mengeluarkan uang baru, pengeluaran uang baru menimbulkan tekanan inflasi.
- c. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta. Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi.

Hal lain yang menjadi penyebab Inflasi yaitu sistem ekonomi kapitalis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya inflasi yaitu:

1. Bunga Bank (Riba) dan berkembang sektor non riil yaitu bursa Efek, karena dengan bunga mengakibatkan keputusan investasi tidak terkait langsung dengan sektor riil baik barang maupun jasa sehingga mengakibatkan pertumbuhan uang akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor riil.
2. Sistem moneter kapitalis menyebabkan inflasi karena; *pertama* , fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar tetapi uang sekaligus **sebagai komoditas**

yang diperdagangkan dalam bursa saham dan bursa valuta asing serta ditariknya bunga (riba) dalam transaksi tersebut. **Kedua** , Sistem mata uang yang menggunakan *flat money* yaitu mata uang yang tidak didukung oleh emas atau perak akan tetapi uang tersebut berlaku hanya atas dasar jaminan pemerintah melalui undang-undang, akibatnya terjadi perbedaan antara nilai nominal uang dan nilai intrinsiknya akan memunculkan inflasi .

3. Kebijakan pemerintah melepas barang-barang atau komoditas yang dibutuhkan oleh semua orang yang sebenarnya merupakan milik publik sehingga mengakibatkan harga menjadi naik, misalnya mencabut subsidi BBM, Listrik dan Telepon serta Air.

2.2 Macam-Macam Inflasi

Inflasi yang terjadi di berbagai negara tentu berbeda-beda tergantung pada penyebab di negara masing-masing. Inflasi terbagi atas:

a. Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi, meliputi:

- 1) Inflasi Ringan (Creeping Inflation) Inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% setahun
 - 2) Inflasi Sedang Inflasi yang tingkatannya berada diantara 10% - 30% setahun
 - 3) Inflasi Berat Inflasi yang tingkatannya berada diantara 30% - 100% setahun
 - 4) Hiper Inflasi Inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100% setahun.
- Hal ini pernah dialami Indonesia pada masa orde lama.

b. Menurut penyebab awal inflasi

- 1) Demand Pull Inflation yaitu Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
- 2) Cost Push Inflation Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terus-menerus. Untuk lebih lanjutnya perhatikan penjelasan inflasi tersebut dengan kurva di bawah ini:
- 3) Inflasi Permintaan dan Penawaran Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi karena antara pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

c. Berdasarkan Asal Inflasi

- 1) Domestik Inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus-

menerus di atas dengan mencetak uang. Hal ini menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi transaksinya dan ini menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan harga barang meningkat.

- 2) Imported Inflation atau inflasi yang tertular dari luar negeri. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri (negara tujuan ekspor), harganya mengalami kenaikan dan ini membawa pengaruh terhadap harga di dalam negeri.

2.3 Dampak Inflasi Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat

- a. Terhadap Konsumen Inflasi menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Sehingga dengan keadaan seperti ini maka akan terjadi perubahan pola konsumsi.
- b. Terhadap Produksi dampak inflasi terhadap produsen untuk memproduksi menjadi menurun, penurunan disebabkan oleh alasan berikut:
 - 1) Kenaikan harga mengurangi kemampuan produsen untuk membeli faktor produksi misalnya bahan baku. Kekurangan bahan baku dapat mengakibatkan jumlah produksi berkurang.
 - 2) Tingginya tingkat bunga pada saat inflasi menyebabkan produsen kesulitan memperluas produksi.
 - 3) Munculnya suatu sikap dari produsen yang bersifat spekulatif diantaranya mengarahkan modalnya pada investasi baru, dan kewajiban memproduksi berkurang, akan mengarah terjadinya PHK
- c. Terhadap Distribusi Dampak inflasi terhadap kegiatan pendistribusian pendapatan masyarakat menjadi terganggu, karena orang berpenghasilan tetap secara riil pendapatannya mengalami kemerosotan. Untuk menutupi kebutuhan akibatnya ia harus menggunakan tabungan atau berhutang.

2.4 Inflasi di Indonesia Dilihat dari Teori Ekonomi

1. Inflasi dalam Teori Keynes

Menurut analisis Keynesian pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang pesat akan menyebabkan tingkat harga mengalami kenaikan secara terus-menerus dengan laju yang tinggi. Menurut Keynes yang dapat menurunkan laju inflasi adalah dengan mempengaruhi pertumbuhan uang yang beredar, dalam hal ini kebijakan moneterlah yang harus dilakukan. Sedangkan untuk Indonesia hal ini

tentu tidak sama banyak hal yang perlu diperhitungkan untuk mengatasi inflasi selain jumlah uang yang beredar.

2. Inflasi dalam Pendekatan Strukturalis

Pandangan kaum strukturalis berkembang dari sejumlah ahli ekonomi Amerika Latin, dimana mereka melihat inflasi itu sebagai sesuatu yang berakar dari adanya berbagai kendala atau kekakuan structural termasuk didalamnya kelembagaan yang ada di negara-negara berkembang. Dengan demikian analisis mereka mengenai inflasi lebih difokuskan terhadap persoalan inflasi yang terjadi di negara-negara berkembang pada umumnya dan terutama di negara-negara Amerika Latin.

Inflasi di Indonesia lebih dapat dijelaskan dengan menggunakan Strukturalis dibandingkan pendekatan Keynes. Hal ini terlihat dari signifikannya variabel-variabel yang merepresentasikan sisi moneter seperti, Jumlah uang Beredar, Tingkat Bunga, Ekspektasi Masyarakat, dan variabel impor. Sementara Output gap yang merepresentasikan faham Keynes tidak menunjukkan pengaruh dan kontribusi yang signifikan pada perilaku inflasi di Indonesia.

Kaum strukturalis tidak hanya memperhatikan factor moneter saja, seperti yang dilakukan oleh Keynes, akan tetapi mereka membahas juga mengenai factor non-moneter. Kaum strukturalis mengidentifikasi beberapa penyebab inflasi di negara-negara berkembang;

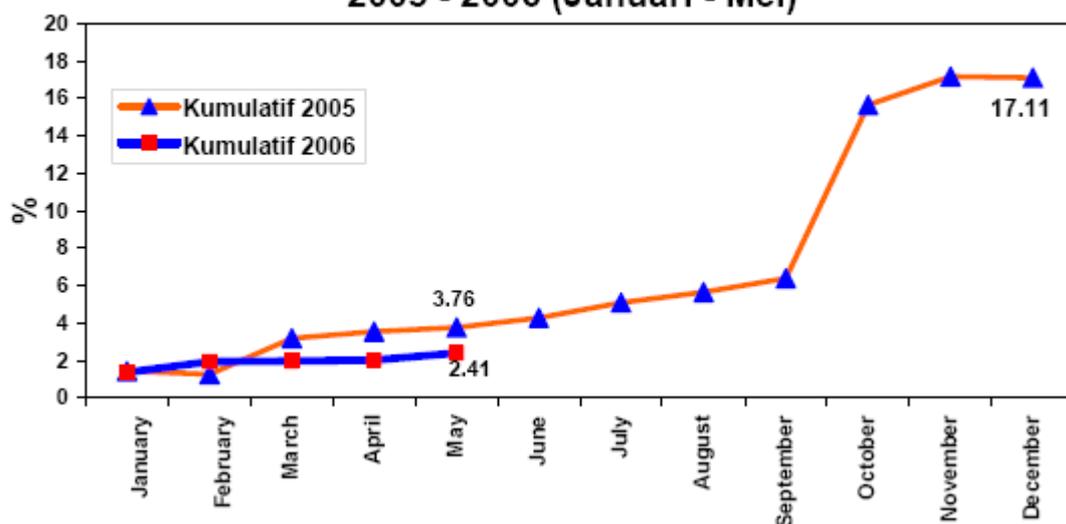
1. Kendala penawaran bahan pangan yang inelastic, dimana dominasi pasar berada di tangan orang yang hanya mementingkan laba atau di tangan para petani gurem yang beroperasi dengan skala kecil.
2. Kendala devisa, kendala ini timbul karena pertumbuhan penerimaan devisa tidak mencukupi untuk barang-barang impor yang berkaitan untuk meningkatkan pembangunan, sehingga ada ketidakseimbangan structural yang disebabkan oleh tingkat teknologi yang masih rendah.
3. Kendala Fiskal, yaitu kendala berupa tidak mencukupinya keuangan dalam negeri. Penerimaan pemerintah tidak dapat mengimbangi pengeluaran, struktur pajak yang bersifat regresif dan birokrasi penagihan pajak sudah kuno, tidak efisien dan korup. Hal tersebut menyebabkan neraca pembayaran menjadi defisit dan selanjutnya akan mengakibatkan inflasi.

2.5 Data, Analisis dan Solusi Inflasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi, bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga sekalipun misalnya dengan negara Malaysia. Persentase Inflasi di Indonesia Apabila dilihat per bulan dari Tahun 2005 sampai tahun 2006.

Months	2005 Inflations	2006 Inflations
January	1.43	1.36
February	-0.17	0.58
March	1.91	0.03
April	0.34	0.05
May	0.21	0.37
June	0.50	0.45
July	0.78	
August	0.55	
September	0.69	
October	8.70	
November	1.31	
December	-0.04	
Inflation Rate	17.11	2.87

Grafik 2
Inflasi Kumulatif (%)
2005 - 2006 (Januari - Mei)



Akibat adanya inflasi yang cukup tinggi, keadaan ekonomi menjadi sulit ditebak selain itu inflasi terbesar selama kurun waktu 2005 sampai 2006 terjadi pada saat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 menyebabkan distribusi

pendapatan makin renggang dan pendapatan riil masyarakat semakin menurun. Selain itu neraca pembayaran kita pun semakin defisit hal tersebut terbukti dengan makin defisitnya APBN pada waktu itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 meminta tim ekonomi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan dan memfokuskan kerjanya pada enam agenda ekonomi utama. Keenam agenda itu adalah mempertahankan dan memperbaiki makroekonomi menuju kondisi yang sehat; mengendalikan inflasi; memperbaiki arus barang kebutuhan pokok; menciptakan lapangan kerja baru dengan merealisasikan pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya; menggenjot pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki neraca pembayaran dengan meningkatkan kontribusi investasi dan ekspor. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi pula.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengakibatkan peningkatan upah yang pada akhirnya mengubah keseimbangan di pasar barang. Harga-harga pun cenderung akan meningkat, belum lagi dengan kondisi harga BBM yang meningkat. Kondisi inflasi menyebabkan daya beli masyarakat akan menurun, sehingga paradigma penghapusan kemiskinan melalui sebuah skema pertumbuhan ekonomi menjadi sesuatu yang dipertanyakan.

Keadaan inflasi yang terus meningkat menyebabkan kekhawatiran bagi banyak kalangan, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena merekalah yang akan paling merasakan dampak dari inflasi. Akan tetapi pemerintah tidak akan menurunkannya secara instan. Karena cara tersebut akan mengorbankan upaya yang selama ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2006 dikhawatirkan inflasi akan semakin memburuk, hal tersebut berkaitan dengan rencana Presiden SBY untuk menaikkan gaji PNS pada tahun 2006.

Hal lain yang berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia adalah nilai tukar. Apresiasi nilai tukar akan mengurangi daya saing barang-barang ekspor, dan meningkatkan penetrasi impor. Menurunnya ekspor dan meningkatnya impor dikhawatirkan akan memperburuk neraca perdagangan. Sebagai negara pengutang yang cukup besar Indonesia tentu tidak dapat menanggung defisit neraca pembayaran yang terlalu besar. Berkaitan dengan ini, tiga hal perlu di perhatikan:

1. Yang menentukan daya saing produk ekspor adalah nilai tukar riil, bukan nilai tukar nominal.
2. Menjaga nilai tukar agar barang ekspor tetap kompetitif hanya menunda usaha untuk membenahi ekonomi biaya tinggi di sektor riil.
3. Bagaimana membiayai defisit neraca.berjalan? Berkaitan dengan ini sungguh tepat, peringatan Dr. Hadi Soesastro (*Jakarta Post*, 10/4/1996) bahwa pemerintah perlu menjaga kredibilitasnya, agar Indonesia tetap dapat menarik modal asing untuk membiayai defisit tersebut.

Menurut Bappenas Inflasi Lanjutan Masih Terasa Hingga Kuartal Pertama 2006 Inflasi ikutan (added inflation) masih akan terjadi terutama memasuki natal dan tahun baru. Menurut Sri Mulyani," *pengaruh ikutan dari kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 yang menghasilkan laju inflasi hingga 8,7% masih ada efek lanjutannya, Inflasi pada Oktober lalu lebih dipengaruhi dua hal pokok yaitu cost push inflation dan demand inflation, sehingga sulit untuk menatanya. Inflasi juga dipengaruhi rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik juga kenaikan upah minimum yang diperkirakan direalisasikan 2006.*"

Akan tetapi pada Triwulan II tahun 2006 perkembangan nilai tukar rupiah terus menguat, sementara perkembangan laju inflasi juga tetap terjaga.. Hal itu tertuang dalam keterangan tertulis Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah pada Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia selama triwulan II/2006 yang disampaikan oleh Rizal A. Djaafara selaku Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI di Jakarta, Senin (31/7). Dalam keterangannya Burhanuddin menambahkan, "*bahwa prospek inflasi ke depan akan sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu 8% dan 6% year on year (y-o-y) untuk masing-masing tahun 2006 dan 2007. Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun 2006 sebesar 7,33 persen. Inflasi yang relatif lebih rendah dari perkiraan semula ini diperkirakan bisa terwujud karena tarif dasar listrik batal naik dan pulihnya kondisi makro-ekonomi lebih cepat dari perkiraan.*" Akan tetapi, menurut Burhanuddin, perbaikan kinerja tersebut belum berkualitas. Sebab, tingkat pengangguran dan jumlah masyarakat miskin masih tinggi akibat lesunya sektor riil. "*Indonesia belum memiliki sektor usaha yang mampu bersaing dalam bisnis dunia. Indonesia masih bergulat pada masalah struktural, seperti iklim investasi, perburuhan, perpajakan, dan kepastian hukum,*" katanya.

Solusi untuk permasalahan inflasi di Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan:

3. Untuk mengatasi inflasi diperlukan koordinasi kebijakan yang tepat antara pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
4. Factor yang paling penting yaitu factor transparansi kebijakan.
5. Untuk mengatasi APBN yang deficit, sebaiknya tidak dengan cara privatisasi asset bangsa. Karena pada akhirnya negara ini tidak akan memiliki apapun untuk digadaikan, karena walau bagaimanapun SDA pasti akan habis suatu saat nanti.
6. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangkal inflasi yaitu dengan investasi emas. Data Statistik menunjukkan bahwa kenaikan inflasi selalu lebih rendah daripada kenaikan harga emas. Investasi emas yang cukup baik adalah investasi emas dalam bentuk batangan (emas logam mulia). Hal itu disebabkan karena emas batangan tidak meminta ongkos pembuatan seperti halnya emas perhiasan.
7. Kebijakan Moneter dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Politik Diskonto ditujukan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
 - b. Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
 - c. Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah.
8. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
 - 1) Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.

- 2) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
9. Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.
- 1) Menaikkan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar.
 - 2) Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
 - 3) Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET).
10. Solusi Islam juga merupakan salah satu cara untuk menghilangkan inflasi adalah dengan menghentikan penerapan sistem ekonomi kapitalis dan mengembalikan penerapan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sistem ekonomi Islam telah membuat suatu mekanisme yang dapat mencegah munculnya inflasi, yaitu :
1. Dalam konteks ekonomi maka pelarangan bunga bank (riba) dan sektor non riil lainnya (bursa efek) mengakibatkan setiap keputusan investasi akan terkait langsung dengan sektor riil. Pada saat yang sama Islam mengharamkan penimbunan mata uang (kanzul Maal), maka alternatif seseorang yang memiliki harta : (1) ia akan pinjamkan tanpa bunga kepada orang lain termasuk modal usaha atau dia berikan dalam bentuk infak, shodakoh dan lainnya , (2) ia akan menjalankan usaha dalam bentuk syrkah dan mudharabah.
 2. Islam menetapkan sistem moneter dengan berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Agar kegiatan ekonomi stabil, maka sistem moneter harus dikembalikan kepada sistem moneter dalam Islam yaitu ; menetapkan fungsi uang hanya sebagai alat tukar tidak dijadikan komoditas dan menetapkan mata uang dengan standard dinar (emas) dan dirham (perak) sehingga nilai

intrinsik (bahan baku) akan selalu sama dengan nilai nominalnya. Kedua hal ini akan mengakibatkan nilai uang senantiasa stabil.

3. Islam menempatkan kebijakan –kebijakan ekonomi senantiasa dilandasi oleh syariat yang akan menguntungkan semua pihak baik konsumen maupun produsen. Dalam konteks barang – barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik dan air syari'at Islam menetapkan barang-barang tersebut menjadi milik publik yang harus dikelola oleh Negara.

2.6 Peranan Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen. Independen diartikan sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya.

Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Dalam hal ini, BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan Inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan Inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dll) sepenuhnya berada diluar pengendalian BI. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat Inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta.

Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah :

1. mengkaji efektivitas instrumen moneter
2. menentukan sasaran akhir kebijakan moneter
3. mengidentifikasi variable yang menyebabkan inflasi
4. menyusun kebijakan moneter

Tujuan BI adalah dalam jangka menengah dan panjang, laju inflasi diharapkan dapat ditekan sekitar 5%. Dalam jangka pendek, angka inflasi dipertahankan dibawah *single digit*. Namun demikian, berbagai kebijakan penyesuaian harga barang yang dikendalikan pemerintah dapat memberikan tekanan inflasi secara signifikan.

BAB III

PERTUMBUHAN EKONOMI

Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi lebih mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP, atau pendapatan atau output per kapita. PDB ini yang mengukur pendapatan dari faktor-faktor produksi di dalam batas teritori negara tanpa mempersoalkan siapa yang menerima pendapatan tersebut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh indikator-indikator lainnya (kuantitas & kualitas tenaga kerja, kekayaan alam, barang modal, dan lain-lain) yang dipengaruhi pula oleh faktor-faktor produksi. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi berproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Adapun hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapangan, khususnya di negara-negara berkembang banyak sekali faktor yang mendistorsi kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah menetapkan besaran penerimaan pemerintah dari sektor pajak serta besaran pengeluaran pemerintah, di samping penetapan target penyerapan tenaga kerja.

Tetapi, beberapa negara mengalami pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan namun bersifat semu karena tidak meratanya

penyebaran hasil pembangunan dan telah mengabaikan berbagai faktor penting, seperti yang pernah dialami oleh Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh meratanya hasil pembangunan melainkan masih adanya beberapa daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan.

3.1 Data

Setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menetapkan berbagai target (asumsi) makro ekonomi yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2006, Pemerintah memiliki target makro perekonomian Indonesia sebagai berikut:

Asumsi Makro 2006	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2
Inflasi (%)	8,0
Kurs (\$/Rp)	9.900,0
SBI 3 bln (%)	9,5
Minyak Indonesia (US\$/btl)	57,0
Prd. Minyak (Jt.btl/hr)	1.050,0
APBN 2006 (dalam triliun)	
Pendapatan Negara	625,2
Belanja Negara	647,7
Pembiayaan	(22,4)
Indikator Ekonomi 8/4/2006	
IHSG (point)	1.379,71
Minyak Dunia (\$/Btl)	75,44
Kurs Tgh.BI (\$/Rp)	9.130,00
SB Deposito(%)	12,15
JIBOR (%)	12,45
SIBOR (%)	5,40
LIBOR (%)	5,39

Target ini yang kemudian melandasi kegiatan perekonomian selama satu periode ke depan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan tindakan ekonomi lainnya Pemerintah berusaha, minimalnya, memenuhi target tersebut. Namun, seperti telah dijelaskan diatas, bahwa terdapat distorsi yang menyebabkan adanya kesenjangan antara target dan kenyataan.

Berdasarkan data perekonomian Badan Pusat Statistik (BPS) selama beberapa tahun terakhir, kita dapat menganalisis secara kasar mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena dari angka-angka pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir, kita dapat langsung melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi.

PERKEMBANGAN APBN 2002 – 2006
(dalam triliun rupiah)

Pos-Pos APBN	2002	2003	2004	2005		2006	
	PAN	PAN	Perk Real	Perk Real	% Real s.d. April	APBN	% Real s.d. Mei
A. Pendapatan Negara dan Hibah	298.6	341.4	403.8	516.2	31.3	625.2	32.0
I. Penerimaan Dalam Negeri	298.5	340.9	403.0	509.0	31.5	621.6	37.2
1. Penerimaan Perpajakan	210.1	242.0	279.2	347.6	32.2	416.3	37.0
2. Penerimaan Bukan Pajak	88.4	98.9	123.8	161.4	28.7	205.3	22.0
II. Hibah	0.1	0.5	0.7	7.2	0.6	3.6	15.9
B. Belanja Negara	322.2	376.5	430.0	542.4	24.9	647.7	29.9
I. Belanja Pemerintah Pusat	224.0	256.2	300.0	392.8	22.6	427.6	24.5
1. Belanja Modal				53.6	3.9	62.9	16.1
2. Pembayaran Bunga Utang	87.7	65.4	63.2	59.2	26.4	76.6	36.1
3. Subsidi	40.0	43.9	69.9	121.9	63.9	79.5	8.1
II. Belanja Daerah	98.2	120.3	130.0	149.6	29.4	220.1	40.4
1. Dana Perimbangan	94.7	111.1	123.1	142.3	31.0	216.6	40.8
a. Dana Alokasi Umum	69.2	77.0	82.1	88.8	40.4	145.7	49.6
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	3.5	9.2	6.9	7.2	3.5	3.5	16.7
a. Dana Otonomi Khusus	-	1.5	1.6	1.8	0.0	2.9	15.0
b. Dana Penyesuaian	-	7.7	5.2	5.5	4.7	0.6	25.6
C. Keseimbangan Primer	64.1	30.2	37.0	33.1	80.4	54.2	62.6
D. Surplus/Defisit (A-B)	(23.6)	(35.1)	(26.3)	(26.2)	(118.4)	(22.4)	(28.0)
E. Pembiayaan (E.I + E.II)	23.6	32.7	26.3	26.2	18.8	22.	(43.6)
I. Pembiayaan Dalam Negeri	16.9	32.1	50.1	30.9	39.0	50.9	7.8
1. Perbankan DN	(8.2)	8.3	23.9	4.2	0.1	23.0	(2.2)
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	25.2	23.9	26.1	26.7	51.0	27.9	16.2
II. Pembiayaan LN (neto)	6.6	0.5	(23.8)	(4.7)	56.3	(28.5)	48.3
1. Penarikan Pinjaman LN	18.9	20.4	21.7	31.6	3.6	35.1	10.1
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(12.3)	(19.8)	(45.5)	(36.3)	26.3	(63.6)	27.2
a. PDB (triliun Rp)	1.610,5	2.086,7	1.990,2	2.636,7		3.040,7	
b. Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,7	4,1	4,8	6,0		6,2	
c. Inflasi (%)	10,03	6,0	7,0	8,0		8,0	2,41
d. Nilai Tukar (Rp/US\$1)	9,3111	8,577	8,900	9,500		9,900	9,172
e. Harga Minyak (US\$/barell)	23,53	28,75	36,0	50,6		57,0	60,18
f. Produksi Minyak (MBCD)	1,270	1,092	1,072	1,075		1,050	
g. Tingkat bunga SBI rata-rata (%)	15,24	10,2	7,5	8,3		9,5	12,68

Rasio APBN terhadap PDB tahun 2002-2006
(dalam persen)

Uraian	2002 (PAN)	2003 (PAN)	2004 (APBN- P)	2005 (APBN-P 2)	2006 (APBN)
1 Pendapatan Negara dan Hibah	18,5	16,4	20,3	19,6	20,6
- Penerimaan Perpajakan	13,0	11,6	14,0	13,2	13,7
- Penerimaan Bukan Pajak	5,5	4,7	6,2	6,1	6,8
- Hibah	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
2 Belanja Negara	20,0	18,0	21,6	20,6	21,4
- Belanja Pemerintah Pusat	13,9	12,3	15,1	14,9	14,1
* Pembayaran Bunga Utang	5,4	3,1	3,2	2,2	2,5
* Subsidi	2,5	2,1	3,5	4,6	2,6
- Belanja Daerah	6,1	5,8	6,5	5,7	7,3
3 Keseimbangan Umum	(1,5)	(1,7)	(1,3)	(1,0)	(0,7)
4 Utang Pemerintah	65,1	58,3	53,9	48,7	n.a.
- Utang Luar Negeri	31,5	28,3	25,3	24,5	n.a.
- Utang Dalam Negeri	33,6	30,0	28,6	24,2	n.a.
5 PDB Nominal (Rp T)	1.897,8	2.086,8	2.303,5	2.636,5	3.040,8
6 Surplus(Defisit) APBN/PDB	(1,4)	(1,7)	(1,1)	(1,0)	(0,7)

Sumber: APBN & NK 2005-2006

Berdasarkan data perkembangan APBN periode 2002 s.d. 2006 di atas, secara kasar dapat disimpulkan bahwa perekonomian nasional untuk periode 2002 s.d. 2006 pada umumnya mengalami peningkatan. Namun perlu dikaji pula bahwa dibalik angka-angka tersebut terdapat fluktuasi kondisi ekonomi yang memerlukan penjelasan yang lebih kompleks.

Pada tahun 2002, perekonomian mengalami peningkatan 3,66% (data lengkap perekonomian tahun 1998-2002 dicantumkan pada lampiran). Sedangkan PDB Indonesia selama tahun 2003 meningkat sebesar 4,10 persen dibandingkan tahun 2002. Pertumbuhan ini terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pengangkutan-komunikasi sebesar 10,69 persen, diikuti oleh sektor listrik-gas-air bersih sebesar 6,82 persen, dan sektor bangunan sebesar 6,70 persen.

**TABEL 1. NILAI PDB TAHUN 2002 & 2003 DAN
PERTUMBUHAN TAHUN 2003 MENURUT LAPANGAN USAHA**

LAPANGAN USAHA	Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 1993 (triliun rupiah)		Laju Pertumbuhan Th. 2003
	2002	2003	2002	2003	(persen)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	275,3	296,2	68,7	70,4	2,48
2. Pertambangan dan Penggalan	178,2	191,2	40,4	40,6	0,46
3. Industri Pengolahan	409,7	440,5	112,0	115,9	3,50
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	30,5	39,7	7,5	8,1	6,82
5. Bangunan	94,0	107,1	25,5	27,2	6,70
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	265,5	291,6	68,3	70,9	3,74
7. Pengangkutan dan Komunikasi	92,8	111,7	33,9	37,5	10,69
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,	110,2	123,0	30,6	32,5	6,28
9. Jasa-jasa	154,5	185,7	40,1	41,5	3,44
PDB	1.610,6	1.786,7	426,9	444,5	4,10
PDB TANPA MIGAS	1.433,8	1.594,9	394,5	412,7	4,60

Dengan mengamati tabel di bawah, Fluktuasi jangka pendek perekonomian Indonesia selama tahun 2003 tercermin pada PDB triwulanan. Pertumbuhan PDB triwulan IV tahun 2003 dibandingkan dengan PDB triwulan III tahun 2003 (*q to q*) menurun sebesar minus 2,78 persen. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pola musiman di sektor pertanian yang turun sebesar minus 22,29 persen. Kemudian PDB triwulan III dibanding triwulan II meningkat sebesar 3,04 persen, dan PDB triwulan II terhadap triwulan I meningkat sebesar 1,12 persen.

**TABEL 2. LAJU PERTUMBUHAN PDB TRIWULANAN
MENURUT LAPANGAN USAHA
(Persentase)**

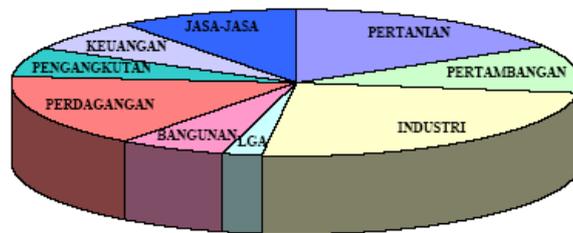
LAPANGAN USAHA	Tr III 2003	Tr IV 2003	Tr IV 2003
	Thd	Thd	Thd
	Tr II 2003	Tr III 2003	Tr IV 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	8,18	-22,29	-0,17
2. Pertambangan dan Penggalan	1,81	2,07	3,19
3. Industri Pengolahan	2,07	-0,16	3,87
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,45	4,71	9,54
5. Bangunan	3,13	3,39	7,15
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,52	-0,06	4,07
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,39	5,47	12,99
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,	0,87	0,66	4,06
9. Jasa-jasa	0,81	0,91	3,92
PDB	3,04	-2,78	4,35
PDB TANPA MIGAS	3,04	-3,18	4,56

Perbandingan PDB riil triwulanan tahun 2003 dengan triwulan yang sama pada tahun 2002 menggambarkan laju pertumbuhan (*year on year*) tanpa pengaruh musiman. Laju pertumbuhan triwulan IV sebesar 4,35 persen, triwulan

III sebesar 3,97 persen, triwulan II sebesar 3,65 persen, dan triwulan I tumbuh sebesar 4,45 persen.

Sedangkan berdasarkan lapangan usaha, PDB nasional 2003 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. STRUKTUR PDB NASIONAL TAHUN 2003



Sedangkan pada tabel di bawah, nampak bahwa PDB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 mencapai Rp. 8,3 juta dan pada tahun 2002 sebesar Rp. 7,6 juta.

TABEL 6. PDB DAN PNB PER KAPITA INDONESIA
TAHUN 2002 DAN 2003
(Juta Rupiah)

Rincian	2002	2003
(1)	(2)	(3)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	7,6	8,3
PNB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	7,3	7,9

Pada tahun 2006, dari kedua tabel di bawah dapat diketahui bahwa PDB Indonesia pada triwulan I tahun 2006 meningkat sebesar 2,03 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2005 (*q-to-q*). Pertumbuhan ini terjadi pada sector pertanian; konstruksi; pengangkutan & komunikasi; keuangan, real estate, jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector pertanian sebesar 18,77 persen sebagai akibat faktor musim panen pada triwulan I.

**LAJU PERTUMBUHAN PDB
MENURUT SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA
(Persentase)**

SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA	Triw IV 2005 Terhadap Triw III 2005	Triw I 2006 Terhadap Triw IV 2005	Triw I 2006 Terhadap Triw I 2005
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-19,86	18,77	3,92
2. Pertambangan dan Penggalian	4,42	-1,74	7,02
3. Industri Pengolahan	0,53	-0,99	2,01
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,39	-0,10	5,21
5. Konstruksi	1,83	0,07	7,18
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-0,26	-0,66	4,19
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,79	1,58	10,99
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Persahaan	0,18	0,33	5,11
9. Jasa-jasa	1,73	0,67	5,44
PDB	-2,18	2,03	4,59
PDB TANPA MIGAS	-2,35	2,32	5,22

**LAJU PERTUMBUHAN KOMPONEN-KOMPONEN
PDB PENGGUNAAN
(Persentase)**

JENIS PENGGUNAAN	Triw IV 2005 Terhadap Triw III 2005	Triw I 2006 Terhadap Triw IV 2005	Triw I 2006 Terhadap Triw I 2005
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,10	-0,92	3,24
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	33,22	-33,63	14,19
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-4,75	-0,11	2,89
4. Ekspor Barang dan Jasa	2,49	-1,76	10,75
5. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	-3,40	1,70	5,01
PDB	-2,18	2,03	4,59

Selain itu, pada kedua tabel di atas dapat juga dilihat bahwa PDB Indonesia pada triwulan I tahun 2006 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2005 (*yon y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I tahun 2006 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2005 menurun secara riil sebesar minus 0,92 persen, demikian pula pengeluaran konsumsi pemerintah menurun sebesar minus 33,63 persen, sementara pembentukan modal tetap bruto turun sedikit sebesar minus 0,11 persen demikian juga ekspor barang-jasa turun sebesar sebesar minus 1,76 persen selanjutnya komponen impor barang-jasa naik sebesar 1,70 persen.

**PDB MENURUT SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2000
 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	Tr IV 2005	Tr I 2006	Tr IV 2005	Tr I 2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan	82,0	102,2	55,8	66,3
2. Pertambangan dan Penggalian	83,5	80,5	42,8	42,1
3. Industri Pengolahan	215,8	220,1	124,6	123,4
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,6	6,7	3,0	2,9
5. Konstruksi	47,9	49,3	26,7	26,7
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	111,5	114,7	74,9	74,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	53,0	53,9	28,5	28,9
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	62,0	63,7	41,2	41,4
9. Jasa-jasa	74,5	75,0	41,0	41,3
PDB	736,8	766,1	438,5	447,4
PDB TANPA MIGAS	645,2	677,5	402,2	411,5

**PDB MENURUT PENGGUNAAN
 TRIWULAN IV TAHUN 2005 DAN TRIWULAN I TAHUN 2006
 (Triliun Rupiah)**

JENIS PENGGUNAAN	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	Tr IV 2005	Tr I 2006	Tr IV 2005	Tr I 2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	489,8	497,9	266,1	263,7
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	77,7	54,1	46,1	30,6
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	160,5	164,6	96,5	96,4
4. a. Perubahan Inventori	-3,9	6,2	-4,5	3,9
b. Diskrepansi Statistik	-38,3	4,1	-7,7	16,8
5. Ekspor Barang dan Jasa	250,0	228,8	194,9	191,5
6. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	199,0	189,6	152,9	155,5
PDB	736,8	766,1	438,5	447,4

Kemudian, kedua tabel di atas menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2006 mencapai Rp 766,1 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 adalah Rp 447,4 triliun.

**STRUKTUR PDB MENURUT SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA
TAHUN 2004-2005 DAN TRIWULAN I 2005-2006
(Persentase)**

SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA	2004	2005	Triwulan I	
			2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14,59	13,41	14,51	13,36
2. Pertambangan dan Penggalian	8,63	10,44	9,17	10,51
3. Industri Pengolahan	28,13	28,05	27,83	28,72
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,97	0,92	0,94	0,87
5. Konstruksi	6,29	6,35	6,32	6,43
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,26	15,74	16,16	14,97
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,25	6,63	6,37	7,04
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	8,56	8,36	8,48	8,32
9. Jasa-jasa	10,32	10,10	10,22	9,78
PDB	100,00	100,00	100,00	100,00
PDB TANPA MIGAS	91,15	88,93	90,50	88,43

Selain itu, dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2005, terjadi peningkatan pada semua komponen penggunaan yakni: pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 3,24 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,19 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,89 persen, ekspor barang-jasa sebesar 10,75 persen, dan impor barang dan jasa sebesar 5,01 persen.

Pulau Jawa masih memegang peranan besar dalam pembentukan PDB Indonesia Tahun 2005 sebesar 58,55 persen, dibanding pulau-pulau besar lainnya dengan berbasis kepada sektor ekonomi sekunder dan tersier.

**Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah
Tahun 2005 (persentase)**

Kawasan	Pertumbuhan		Kontribusi	
	2001 - 2005	2005	2001 - 2005	2005
1 Jawa	4,88	5,64	58,31	58,55
2. Sumatera	3,36	2,76	21,45	20,53
a. Sumatera Barat	4,97	5,79	1,66	1,67
b. Kepulauan Riau	3,81	6,52	1,65	1,50
c. Bengkulu	5,06	5,73	0,36	0,37
3 Kalimantan	3,22	3,57	9,07	9,45
4. Sulawesi	5,27	6,02	4,10	4,00
a. Gorontalo	6,53	6,95	0,12	0,12
b. Sulawesi tengah	6,35	7,66	0,65	0,64
d. Sulawesi Tenggara	6,84	7,30	0,45	0,49
Lainnya	4,52	14,18	5,77	6,18
Papua	5,61	35,70	1,32	1,65

Ada suatu benang merah tentang fenomena ekonomi antar pulau, Sektor primer pertanian yang nilai tambahnya hampir seluruhnya dinikmati penduduk domestik, pertumbuhannya rendah. Sedangkan sektor sekunder dan tersier yang penguasaan

factor produksinya lebih dikuasai penduduk luar domestik mempunyai pertumbuhan yang relative lebih baik, Sebaliknya, sektor perdagangan yang lebih banyak dikuasai penduduk domestic pertumbuhannya relatif tinggi.

3.2. Analisis

Berdasarkan data-data kongkrit yang tersedia, kita bisa membuat suatu analisis mengenai pertumbuhan ekonomi nasional selama 5 tahun terakhir. Sehingga diperoleh kesimpulan naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, penyebabnya, sekaligus solusi yang mungkin diambil (apabila terjadi penurunan), khususnya pada periode berjalan yaitu tahun 2006.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2006

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2006 dipastikan di bawah 5 persen, yakni sebesar 4,59 persen. Kita masih berharap pertumbuhan pada 2006 bisa mendekati enam persen seperti yang diasumsikan oleh Pemerintah sebesar 6,2 persen. Nampaknya, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2004 lalu, dampaknya masih berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I 2006 yang memang masih dalam situasi belum memenuhi target, angkanya hanya di bawah 5 persen.

Data resmi pertumbuhan ekonomi adalah 5,9 persen meski DPR meminta direvisi karena melihat pada semester II mungkin sulit untuk membukukan pertumbuhan drastis hingga 7 persen untuk mengkompensasi pertumbuhan semester I yang pasti di bawah 5 persen. Pertumbuhan pada kuartal pertama 2006 itu 4,59 persen dan pertumbuhan dalam APBNP 2006 adalah 5,9 persen. Tetapi kalau melihat trennya tidak terlalu buruk dari 4 persen 2004, 5,6 persen 2005 dan 5,9 persen 2006.

Pemerintah harus terus mengamati pertumbuhan ini dari kuartal ke kuartal, untuk melihat apakah pertumbuhan itu masih stagnan atau mulai konsolidasi atau sudah mulai menuju ke arah yang positif bagi perekonomian. Meski mengalami tren positif, tetapi masih harus melihat per kuartalnya. Itu menjadi syarat untuk menunjukkan tanda-tanda apakah masih stagnan atau apakah mulai konsolidasi atau sudah terjadi kegiatan yang positif bagi perekonomian

Realisasi APBN hingga 7 juli 2006, penerimaan mencapai Rp247,806 triliun atau 39,6 persen dari APBN yang disumbangkan oleh pajak Rp192,224 triliun, PNBP Rp54,918 triliun dan hibah Rp663,4 miliar.

Untuk belanja hingga 7 Juli telah dibelanjakan Rp247,523 triliun atau 31,4 persen dari APBN yang berasal dari belanja dari pemerintah pusat Rp149,366 triliun dan belanja daerah Rp104,156 triliun, dengan demikian masih terdapat surplus sebesar Rp283,6 miliar.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2006 ini nampaknya masih akan melambat akibat belum tumbuhnya investasi dan sektor riil. Harapan pertumbuhan ini dapat dijadikan dukungan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7%. Target pertumbuhan ekonomi 5,7 % bisa dicapai bahkan lebih jika pemerintah berhasil mendorong sisi permintaan maupun melonggarkan sisi supply.

Dengan pertimbangan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun ini karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2006 rendah, maka dilakukan koreksi dalam APBN Perubahan (APBN-P). Pertumbuhan ekonomi pada APBN Perubahan 2006 dikoreksi menjadi 5,8% dari target pertumbuhan ekonomi pada rencana awal APBN 2006 yang ditetapkan 6,2%. Di sisi lain, asumsi harga minyak yang diproyeksikan US\$62/barel, dinaikkan menjadi US\$64/barel. Diperkirakan pada semester kedua 2006, kenaikan harga minyak dunia lebih tinggi dari prediksi awal. Pada rencana awal APBN 2006 pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai 6,2%, namun pada amendemen UU No 13/2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 5,9%. Tetapi usulan ini dinilai terlalu tinggi, sehingga ditetapkan target pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2006 sebesar 5,8%

Indikator ekonomi pada APBN-P 2006 hasil Panja DPR			
Keterangan	APBN	Proyeksi	APBN-P
PDB Nominal (Rp triliun)	3.040,8	3.122	-
Pertumbuhan (%)	6,2	5,9	5,8
Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.900	9.300	9.300
Inflasi (%)	8,0	8,0	8,0
SBI 3 bulan	9,5	12,0	12,0
Harga minyak (US\$/barel)	57	62	64
Lifting (juta bph)	1,050	1,000	1,000

Pada kuartal kedua Bappenas akan fokus pada penyerapan anggaran pemerintah sebagai

penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan koreksi ini pula, pihak Bappenas optimistis pertumbuhan akan mencapai 5,9%. Apalagi telah terjadi kenaikan ekspor

pada Januari-Mei 2006 sebesar 13,4% dan paket-paket kebijakan sudah terjadwal implementasinya.

Penyebab Angka Pertumbuhan Ekonomi Rendah

Pertumbuhan ekonomi mulai menurun sejak triwulan I 2005. Pada saat itu, ekonomi tumbuh 6,35 persen, kemudian menurun menjadi 6,19 persen pada trwulan selanjutnya, dan anjlok menjadi 4,59 persen di triwulan I 2006

Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:

1. Kenaikan harga BBM

Fenomena ini mengakibatkan daya beli dalam negeri turun sehingga nilai impor pun turun. Walaupun indikator pendapatan per kapita penduduk Indonesia menunjukkan perbaikan; dari 1.200 dolar AS per kapita pada zaman Orde Baru menjadi 1.500 dolar AS saat ini tetapi dengan pendapatan per kapita sebesar itu, masih terjadi tingkat pengangguran yang mencapai 10,45 persen yang justru disebut-sebut tertinggi sejak Orde Baru.

2. Pembiayaan bank macet.

Pembiayaan yang bermasalah, yakni seretnya kredit bank disebabkan oleh masih tingginya tingkat suku bunga. Tak ada yang menyangkal kalau tekanan terhadap inflasi juga masih cukup tinggi. Dengan situasi dan kondisi seperti itu, rasanya kita tak cuma belum keluar dari krisis ekonomi, tapi juga bukan mustahil malah menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai kalau pertumbuhan kredit tahun 2006 mencapai 18 persen. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan dalam semester I 2006 hanya 2,4 persen atau Rp 17,4 triliun.

Pertumbuhan kredit yang sangat rendah itu pun masih ditopang kredit penerusan (channeling) sebesar Rp 7,95 triliun. Penerusan kredit yang pencatatannya di luar neraca ini berisiko rendah bagi bank karena dananya umumnya berasal dari pemerintah atau lembaga luar negeri. Itu berarti, bank tidak berani menyalurkan kredit dengan menggunakan dana masyarakat yang dihimpunnya. Tingginya risiko sektor riil dan rendahnya kemampuan bank mencari debitor berpotensi menjadi sejumlah faktor penyebab.

Berdasarkan perhitungan BI, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen diperlukan dana Rp 708 triliun. Dana tersebut antara lain berasal dari kredit, APBN, dan investasi asing. Kredit bank ditargetkan menyumbang sekitar Rp 150 triliun atau 21 persen dari total kebutuhan. Tetapi dengan pertumbuhan kredit selama semester I yang baru mencapai Rp 17,4 triliun target ini sulit untuk dicapai.

Namun, indikator utama perkembangan perbankan pada kuartal kedua secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data BI pada Mei 2006, dana pihak ketiga naik Rp 37,4 triliun dan aset perbankan naik Rp 48 triliun. Kemudian, risiko kredit secara umum juga memperlihatkan perkembangan menggembirakan dengan menurunnya rasio kredit bermasalah (NPL) net menjadi 5,1 persen dari 5,6 persen pada April 2006. Secara gross, NPL turun menjadi 8,8 persen dari 9,4 persen pada April 2006. Semoga ini menjadi pertanda bahwa perekonomian mulai membaik.

3. Ketidakmampuan pemerintah daerah menstimulus pertumbuhan sektor riil.

Sementara itu, anggaran belanja barang pemerintah yang diharapkan menjadi satu-satunya penolong bagi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang tidak memuaskan. Realisasi belanja barang pemerintah pusat pada semester I 2006 hanya mencapai 24,1 persen, masih di bawah realisasi belanja barang periode yang sama tahun 2004 sebesar 29,1 persen. Secara politik, pemerintah sudah membuktikan bahwa stabilisasi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan di sisi masyarakat madani, orang mulai berani mengkritik pemerintah dengan berbagai cara. Sementara di sisi ekonomi pasar, perekonomian masih belum memanfaatkan pasar modal yang sudah berusia 29 tahun. Pasar modal seharusnya mampu mendorong sektor riil.

Selain masalah dari sisi pembiayaan, yakni seretnya kredit, soal lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah ketidakmampuan pemerintah daerah memanfaatkan dana yang tersedia untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Surplus dana yang berasal dari dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah nyatanya tak termanfaatkan secara optimal. Surplus dana yang dimiliki pemda justru ditaruh di bank dan selanjutnya oleh bank ditempatkan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Situasi itu terjadi antara lain karena tak adanya kepastian hukum dalam pembangunan proyek, perencanaan yang kurang matang, dan kemauan daerah

yang rendah secara politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hampir sepertiga dari APBN dikirim ke daerah lewat perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tetapi sampai sekarang tidak ada (sistem insentif dan penalti tersebut).

4. Bencana alam.

Beban pemerintah untuk membiayai pertumbuhan ekonomi makin berat seiring datangnya berbagai bencana alam. Dana yang diperlukan untuk merehabilitasi fisik kawasan yang hancur dan psikologis masyarakat yang anjlok tentu tidak sedikit. Selain itu, bencana alam juga mengakibatkan bertambahnya bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran

Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi berdampak logis terhadap meningkatnya angka pengangguran. Saat ini pengangguran total atau terbuka mencapai 10,9 juta, sedangkan setengah menganggur sekitar 40,1 juta atau 37 persen dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga menghilangkan momentum untuk memulihkan diri lebih cepat dari kemerosotan sehabis krisis.

Selama 2004-2009 pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun. Tingkat pengangguran diharapkan turun menjadi 5,7 juta orang (2009). Pemerintah berasumsi setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi akan menambah lapangan kerja untuk sekitar 459.000 orang. Asumsi ini dibuat berdasarkan pengalaman selama Orde Baru yang menunjukkan bahwa untuk setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi biasanya menciptakan 500.000 lapangan kerja.

Apabila pertumbuhan ekonomi tidak mencapai rata-rata 6,6 persen, maka asumsi tingkat pengangguran pasti tidak tercapai. Selama lima kuartal terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5,4 persen atau jauh di bawah target 6,6 persen. Seandainya target 6,6 persen tercapai, pengalaman 2000-2005 menunjukkan setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi hanya menambah lapangan kerja untuk sekitar 213.000 orang tenaga kerja. Berarti, dengan pertumbuhan ekonomi 6,6 persen hanya akan menambah lapangan kerja sekitar 1,4 juta per tahun.

Lazimnya, 1% pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja untuk 400 ribu orang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang dipatok 5,4%, berarti hanya akan ada lowongan kerja buat 2,16 juta orang. Padahal, jumlah

penganggur di Indonesia, menurut Biro Pusat Statistik, sekitar 10 juta orang. Angka ini belum termasuk pencari kerja baru yang muncul di tahun 2005.

Solusi

Melihat kondisi sekarang, Pemerintah harus melaksanakan kebijakan untuk mengoptimalkan stimulus fiskal dan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ke atas. Sedangkan kebijakan moneter pemerintah diupayakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dengan membentuk ekspektasi inflasi dan suku bunga.

Misalnya pada sisi stimulus fiskal, sisi untuk mendorong investasi melalui perbaikan iklim investasi. Mungkin juga nanti pelonggaran kebijakan moneter yang akan diatur oleh BI. Ini semua bisa memberikan harapan bagi perekonomian Indonesia supaya semester II ada kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, banyak variabel-variabel makro ekonomi yang berubah yang akan dituangkan di dalam APBN-P 2006 yang juga akan mempengaruhi komposisi penerimaan maupun pengeluaran dan pembiayaan defisit.

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa dari sisi pendapatan, mungkin masih bisa diupayakan untuk tidak terlalu meleset tapi untuk pengeluaran tampaknya cukup banyak yang berubah terutama dari pos subsidi, pos pembayaran bunga utang luar negeri, juga berbagai pengeluaran akibat perkembangan baru-baru ini seperti gempa di Yogyakarta dan juga untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk anggaran pendidikan.

Dari hal itu, sisi pembiayaan masih harus diusahakan supaya kebutuhan financing untuk logistik 2006 harus bisa tertutup secara baik dan dengan risiko yang seminimal mungkin.

Untuk itu pemerintah sepatutnya mengoptimalkan sumber yang berasal dari pasar baik dari penjualan Surat Utang Negara (SUN) di dalam negeri dan melalui pinjaman program dan proyek yang nanti akan dibahas dalam forum CGI. Selain itu, digunakan sumber lain seperti dana privatisasi yang sudah diamanatkan dalam APBN 2006, dengan harapan akan tercapai kondisi ekonomi yang lebih kondusif.

Di bidang investasi, Direktorat Jenderal dan Bea Cukai (DJBC) harus mampu merumuskan berbagai langkah strategis guna melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang investasi, dengan menetapkan kebijakan operasional yang menyangkut pemberian fasilitas impor bahan baku produk ekspor, penyederhanaan

dan otomatisasi pelayanan ekspor impor dan kemudahan bagi industri yang berorientasi ekspor.

Penetapan kebijakan operasional ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang investasi dan sekaligus sebagai bahan acuan bagi dunia usaha dalam melakukan peningkatan daya saing nasional. Seluruh kebijakan operasional DJBC di bidang investasi ini, semata-mata dimaksudkan sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah guna mendorong perbaikan iklim investasi nasional, yang akan membantu dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan kebijakan operasional untuk perbaikan iklim investasi adalah untuk mendukung upaya peningkatan ekspor dan daya saing produk ekspor nasional, mulai dari proses importasi atas barang modal dan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor, sampai dengan pelayanan pada saat pelaksanaan realisasi ekspor.

Fasilitas dan kemudahan pada saat impor barang modal dan bahan baku produk ekspor, dapat dilihat dari berbagai kebijakan mengenai pemberian jalur prioritas, fasilitas pembayaran berkala, sistem penetapan jalur sesuai kinerja importir dan pemberian berbagai kebebasan dan keringanan bea masuk atas barang impor modal untuk pembangunan dan pengembangan industri.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah sektor pertanian yang merupakan mayoritas Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis input-output. Hasilnya, menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi nasional masih cukup signifikan, yakni menyumbang 36,02 persen bagi total output dengan nilai tambah sebesar 18,04 persen. Subsektor pertanian yang berpotensi untuk dijadikan sebagai andalan adalah subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Dilihat dari laju peningkatan nilai tambahnya, pendekatan strategi ADLI (yang mengedepankan sektor pertanian) ternyata lebih tinggi daripada strategi ELI (yang mengedepankan permintaan ekspor dan penanaman modal asing). Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa investasi di sektor pertanian perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengimbangi excess permintaan (excess demand) yang ada.

Demikian pula dengan perangkat pertumbuhan dan pengangguran yang dibahas di atas. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menyebabkan tingkat

pengangguran yang tinggi dan sebaliknya tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah.

Oleh karena itu, harus dicari jalan keluar pemecahan perangkap pertumbuhan dan pengangguran, misalnya menambah lapangan kerja. Alternatif ini mencapai dua sasaran penting yang dapat dicapai, yakni penambahan jumlah orang yang bekerja sehingga akan menambah produksi alias terjadi pertumbuhan ekonomi riil. Kedua, pengangguran sebagai sumber masalah sosial dapat ditekan sehingga iklim investasi kian kondusif. Setelah pengangguran dapat ditekan pada ambang toleransi ekonomi (4-5 persen) dilanjutkan dengan program peningkatan kesejahteraan pekerja. Ekonomi pun mengalami pertumbuhan yang berkualitas secara berkesinambungan

Dan selain semua langkah diatas, satu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka pemulihan pertumbuhan ekonomi adalah sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah selaku otoritas fiskal dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Sehingga tercipta sinergi sebagai akibat dari kebijakan yang saling mendukung dalam rangka mencapai perekonomian yang stabil.

Dari semua uraian mengenai pertumbuhan ekonomi dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa berdasarkan kriteria Bank Dunia yang mengklasifikasi negara berdasarkan jumlah pendapatan per kapita, saat ini dengan posisi \$ 1.500, Indonesia berada pada level *Lower Middle Income*. Posisi ini sama dengan level yang diraih Indonesia pada tahun 1992 dengan posisi pendapatan per kapita \$ 670. Jika dilihat dari angkanya memang mengalami peningkatan sebesar \$ 830.

DAFTAR PUSTAKA

Ritonga Jhon Tafbu. Kamis, 27 Jul. 2006. - .Tersedia:

<http://www.depkominfo.go.id>

<http://www.e-bursa.com>

<http://www.bps.go.id>

Sukirno Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi edisi kedua*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada

Nanga Muana. 2001. *Makroekonomi Teori Masalah dan Kebijakan edisi pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setiawan Aris Budi. 2006-04-18. *Inflasi*. Tersedia:

<http://library.gunadarma.ac.id>

(9 Agustus 2006)

<http://www.csis.or.id>

<http://www.Kapanlagi.com>

<http://www.indonesia.go.id>

Senduk Safir. *Emas Sebagai Penangkal Inflasi*. Tersedia:

<http://www.perencanakeuangan.com/files/Emas.html> (9 agustus 2006)

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/>

Nasim Arim. (2005). *Produk Ekonomi Kapitalis*. Tersedia: [http://hizbut-](http://hizbut-tahrir.or.id)

[tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id) (9 Agustus 2006)

Riza Budi.Modul online.Tersedia: <http://www.e-dukasi.net>. (9 Agustus 2006)

LAMPIRAN

Tabel 1. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia, 1999 - 2002

INDIKATOR	1999	2000	2001	2002
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0.79	4.92	3.44	3.66
Inflasi (%)	2.01	9.35	12.55	10.03
PDB Harga Konstan 1993 (Milyar Rp)	379,352.50	398,016.90	411,691.00	426,740.50
PDB per Kapita Harga Berlaku (Ribu Rp)	5,489.70	6,145.10	6,938.20	7,594.30
Neraca Perdagangan Luar negeri (Juta US\$)	24,662.10	28,609.20	25,248.50	25,762.70
a. Ekspor (Juta US \$)	48,665.40	62,124.00	56,035.40	57,002.30
b. Impor (Juta US \$)	24,003.30	33,514.80	30,786.90	31,239.60
Investasi:				
a. PMDN (Milyar Rupiah)	53,120.20	92,410.40	58,816.00	25,262.30
b. PMA (Juta US \$)	10,892.20	15,426.20	15,055.90	9,744.10
Suku bunga deposito Berjangka Bank Umum 1 tahun (%)	23.97	11.16	14.54	13.06
Kunjungan Wisatawan Asing (Ribu Orang)	4,727.50	5,064.20	5,153.60	5,033.40
Produksi Padi				
a. Sawah (Juta Ton)	48.20	49.20	47.90	48.79
b. Ladang (Juta Ton)	2.67	2.69	2.57	2.58
Nilai Tukar Petani (rata-rata)				
a. Jawa Barat	101.40	105.50	109.00	124.60
b. Jawa Tengah	114.30	91.90	101.90	112.10
c. Sumatera Utara	81.90	88.50	93.10	98.20
Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	48.00	38.70	37.90	38.40

Sumber: LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2002.

Tabel 2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 1998 - 2002
(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	172,827.60 (18.08)	215,686.70 (19.61)	217,897.90 (17.23)	246,298.20 (16.99)	281,325.00 (17.47)
Pertambangan dan Pengalihan	120,328.60 (12.59)	109,925.40 (10.00)	175,262.50 (13.86)	191,762.40 (13.23)	191,827.20 (11.91)
Industri Pengolahan	238,897.00 (25.00)	285,873.90 (25.99)	314,918.40 (24.90)	362,031.20 (24.98)	402,601.10 (25.01)
Listrik, Gas dan Air Minum	11,283.10 (1.18)	13,429.00 (1.22)	16,519.30 (1.31)	21,183.90 (1.46)	29,100.50 (1.81)
Bangunan	61,761.60 (6.46)	67,616.20 (6.15)	76,573.40 (6.05)	85,263.20 (5.88)	92,366.30 (5.74)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	146,740.10 (15.35)	175,835.40 (15.99)	199,110.40 (15.74)	234,262.60 (16.16)	258,869.20 (16.08)
Pengangkutan dan Komunikasi	51,937.20 (5.43)	55,189.60 (5.02)	62,305.60 (4.93)	75,795.90 (5.23)	97,343.50 (6.05)
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	69,891.70 (7.31)	71,220.20 (6.48)	80,459.90 (6.36)	91,438.40 (6.31)	105,621.70 (6.56)
Jasa-jasa	82,086.80 (8.59)	104,955.30 (9.54)	121,871.40 (9.63)	141,362.20 (9.75)	150,957.20 (9.38)
Produk Domestik Bruto	955,753.70 (100.00)	1,099,731.70 (100.00)	1,264,918.70 (100.00)	1,449,398.10 (100.00)	1,610,011.60 (100.00)
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	847,697.40 (88.69)	992,179.10 (90.22)	1,081,417.90 (85.49)	1,261,383.30 (87.03)	1,421,676.40 (88.30)

Sumber: LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2002.

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDB.

Tabel 3. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha, 1998 - 2002 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	63,609.50 (-1.33)	64,985.30 (2.16)	66,208.90 (1.88)	66,858.20 (0.98)	68,018.40 (1.74)
Pertambangan dan Penggalian	37,474.00 (-2.76)	36,865.80 (-1.62)	38,896.40 (5.51)	38,894.80 0.00	39,768.10 (2.25)
Industri Pengolahan	95,320.60 (-11.44)	99,058.50 (3.92)	104,986.90 (5.98)	109,290.20 (4.10)	113,671.70 (4.01)
Listrik, Gas dan Air Minum	5,646.10 (3.03)	6,112.90 (8.27)	6,574.80 (7.56)	7,078.00 (7.65)	7,514.60 (6.17)
Bangunan	22,465.30 (-36.44)	22,035.60 (-1.91)	23,278.70 (5.64)	24,259.10 (4.21)	25,255.30 (4.11)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	60,130.70 (-18.22)	60,093.70 (-0.06)	63,498.30 (5.67)	66,888.10 (5.34)	69,303.20 (3.61)
Pengangkutan dan Komunikasi	26,975.10 (-15.13)	26,772.10 (-0.75)	29,072.10 (8.59)	31,207.10 (7.34)	33,649.50 (7.83)
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	28,278.70 (-26.63)	26,244.60 (-7.19)	27,449.40 (4.59)	28,388.60 (3.42)	29,963.20 (5.55)
Jasa-jasa	36,475.00 (-3.85)	37,184.00 (1.94)	38,051.50 (2.33)	38,826.90 (2.04)	39,596.60 (1.98)
Produk Domestik Bruto	376,374.90 (-13.13)	379,352.50 (0.79)	398,016.90 (4.92)	411,691.00 (3.44)	426,740.50 (3.66)
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	341,992.50 (-14.22)	345,418.50 (1.00)	363,758.70 (5.31)	378,957.20 (4.18)	393,732.10 (3.90)

Sumber: LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2002.

Catatan: Angka dalam kurung merupakan laju pertumbuhan.

Tabel 4. Produk Domestik Bruto per Kapita, 1994 – 2002 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	PDB Per Kapita	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
1994	2,004.6	1,859.9
1995	2,349.1	1,983.6
1996	2,706.0	2,102.6
1997	3,205.7	2,212.6
1998	4,760.8	1,874.8
1999	5,421.9	1,870.3
2000	6,145.1	1,933.6
2001	6,398.2	1,970.7
2002	7,594.3	2,012.9

Sumber: LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2002.